

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan telah menyelesaikan implementasi satu bagian dari Rencana Strategi (RENSTRA) 2021-2026. Implementasi Renstra telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Bakesbangpol dalam melaksanakan misinya. Hal ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol memposisikan diri sebagai fasilitator stakeholder pembangunan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja 2024 Bakesbangpol Kabupaten Pacitan, disusun dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja. Dalam hal ini Laporan Kinerja merupakan media bagi Bakesbangpol untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah dan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Laporan Kinerja ini juga sebagai sumber informasi serta bahan pertimbangan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024 tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan



Pacitan, Januari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN**

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780528 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 4
1.2	Tugas Fungsi 5
1.3	Isu Strategis 6
1.4	Cascading Kinerja 7
1.5	Peta Proses Bisnis 9
1.6	Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Bakesbangpol 36
2.2	Tujuan dan Sasaran 38
2.3	Perjanjian Kinerja 39
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi 54
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 55
3.3	Realisasi Anggaran..... 60
BAB IV	PENUTUP 67
	KESIMPULAN
LAMPIRAN	
1.	Form Pengukuran Kinerja Tahun 2024 sesuai Dokumen Perubahan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bakesbangpol Kabupaten Pacitan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, maka dilakukan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun sebagai upaya untuk menentukan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dikelola secara terukur yang mengarah pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah. Laporan kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Pacitan, laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi

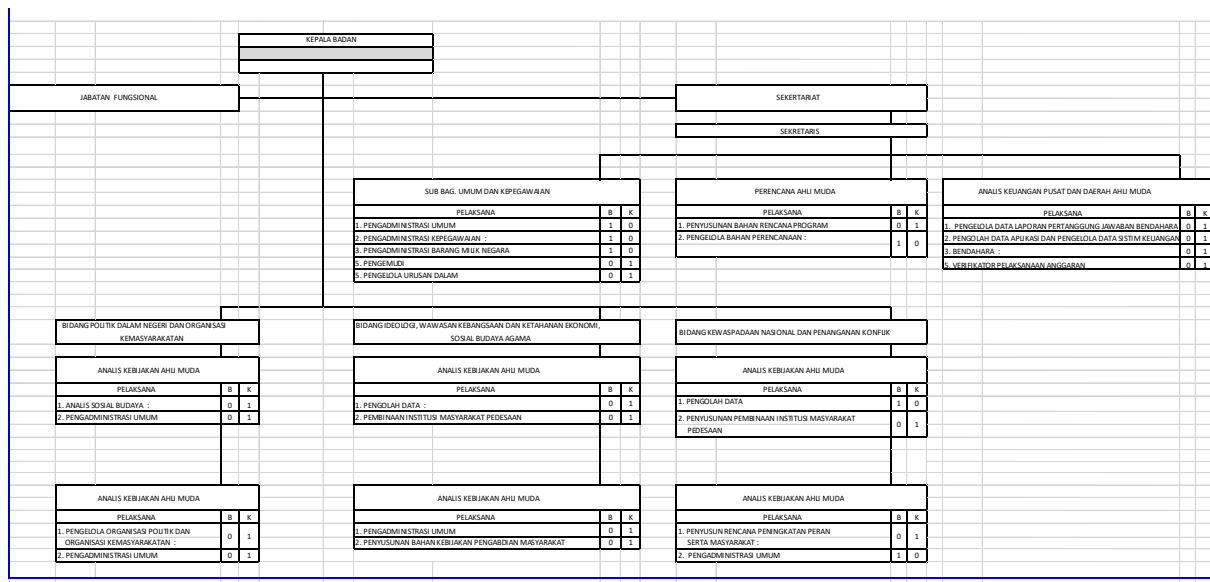
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Bakesbangpol di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam Renstra dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bakesbangpol Kabupaten Pacitan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bakesbangpol dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Daerah. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Tahun 2024.

Struktur Organisasi Bakesbangpol



1.2 TUGAS FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Di bidang kesatuan bangsa dan politik:

1.2.1 Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.

1.2.2 Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

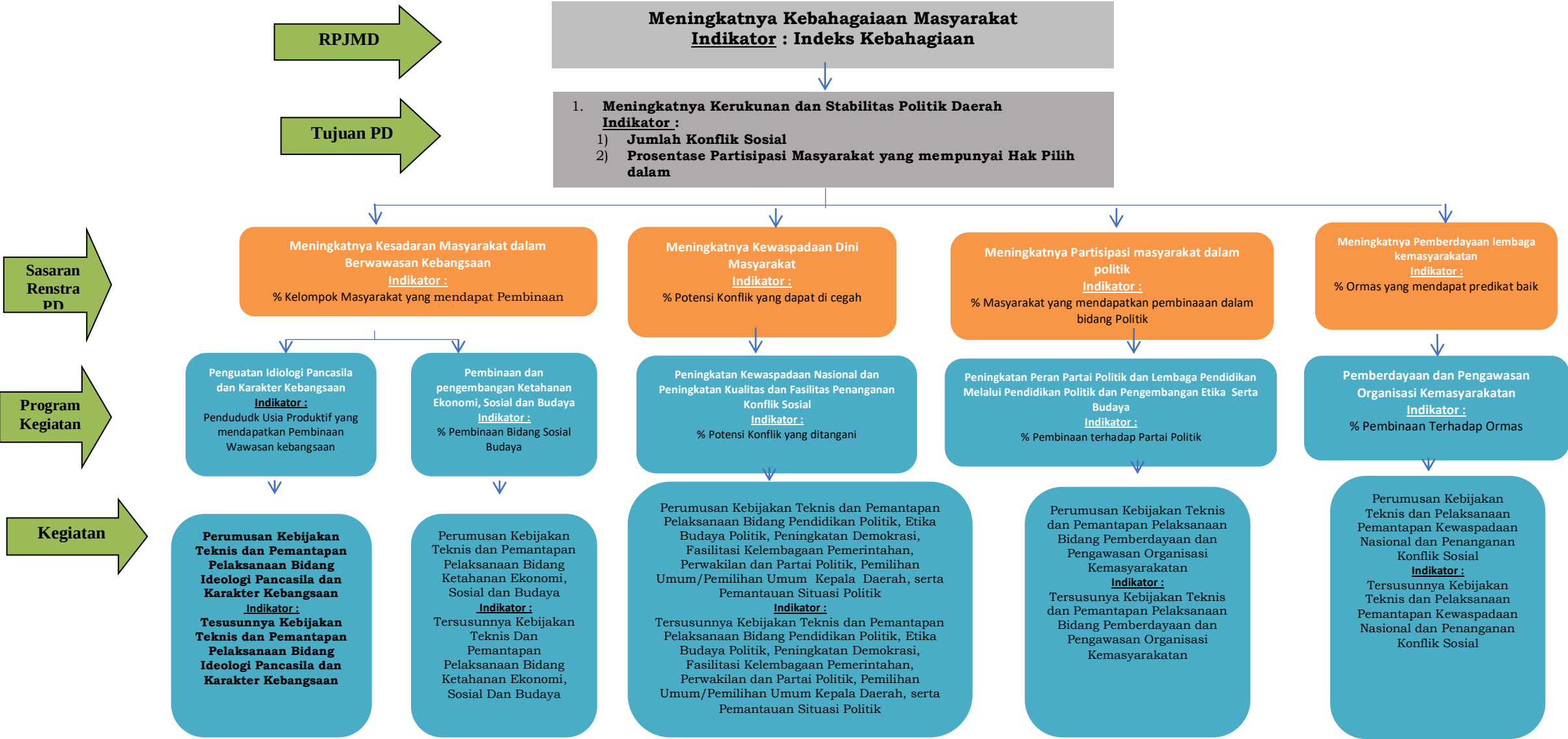
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota

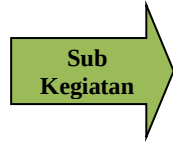
1.3 ISU STRATEGIS

- A. Menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai upaya menciptakan Pelayanan Kesbangpol sebagai berikut :
 - 1. Sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas dalam PD, sehingga dapat menyebabkan kinerja yang lamban dan kurang efisien.
 - 2. Sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum) , Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik.
 - 3. Komitmen seluruh *stakeholders* sebagai upaya memelihara kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif serta memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.
- B. Isu Strategis perangkat Daerah yaitu :
 - 1. Adanya potensi konflik di Daerah

1.4 CASCADING KINERJA

Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan





1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator :

1. Jumlah Dokumen bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika yang dicetak

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator :

1. Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator :

Jumlah Dokumen Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang di cetak

2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Indikator :

Jumlah Dokumen Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator :

Jumlah Peserta Pendidikan Politik ,Etika Buadya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik , Pemilihan Umum/ Pemilu Kepala daerah , serta pemantauan situasi politik di daerah

1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator :

1. Jumlah Data Ormas yang dimutakhirkan

2.Fasilitas bantuan ormas

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator :

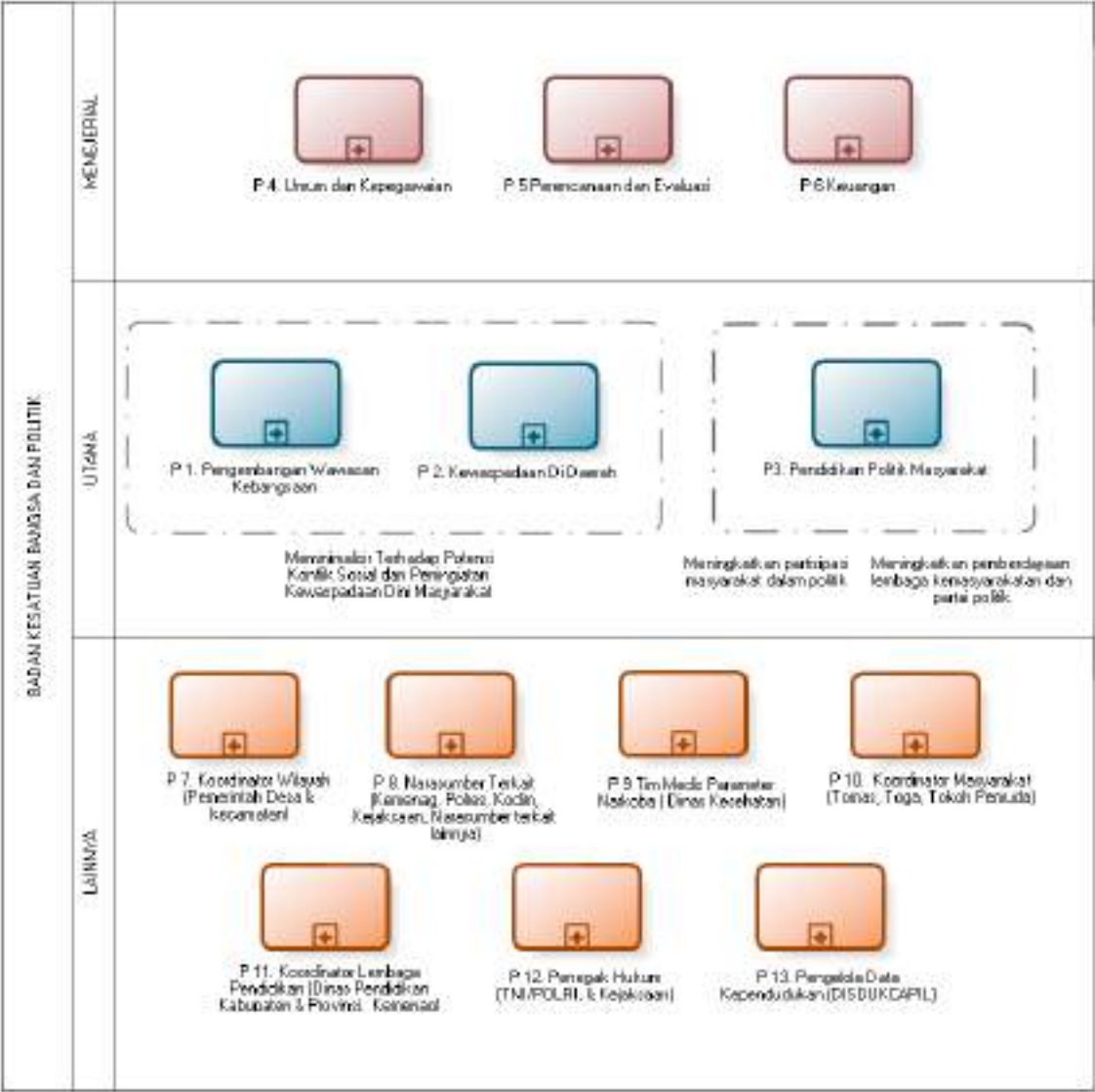
Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator :

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1.5 PETA PROSES BISNIS BAKESBANGPOL



1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERIODE : DESEMBER

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
801	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	76.31	3.396.279.608,00	0.00	3.176.089.293,00	0%	93.52%
801	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	39.190.000,00	23.00	37.510.400,00	100%	95.71%
801	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23	39.190.000,00	23.00	37.510.400,00	100%	95.71%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	95,71
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59	2.272.443.108,00	59.00	2.232.775.768,00	100%	98.25%
801	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14.00	2.272.443.108,00	14.00	2.232.775.768,00	100%	98.25%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapat layanan	%	100	22.810.500,00	100.00	22.635.000,00	100%	99.23%
801	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	22.810.500,00	1.00	22.635.000,00	100%	99.23%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,23
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
801	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Operasional Dasar PD yang terpebuhi	%	100	524.795.160,00	100.00	354.231.547,00	100%	67.5%
801	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.793.500,00	1.00	20.686.700,00	100%	99.49%
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	53.354.970,00	1.00	53.217.300,00	100%	99.74%
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	31.663.055,00	1.00	28.815.100,00	100%	91.01%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	55.968.925,00	1.00	55.699.900,00	100%	99.52%
			0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	42.004.710,00	1.00	41.997.223,00	100%	99.98%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	321.010.000,00	12.00	153.815.324,00	100%	47.92%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	89,61
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
801	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional Perangkat Daerah yang diibutuhkan	%	100	284.095.000,00	100.00	279.555.028,00	100%	98.4%
801	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.100.000,00	12.00	2.600.000,00	100%	83.87%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	65.884.500,00	12.00	61.844.528,00	100%	93.87%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	215.110.500,00	12.00	215.110.500,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	92,58
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80	252.945.840,00	80.00	249.381.550,00	100%	98.59%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
801	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	12	99.431.000,00	12.00	96.108.700,00	100%	96.66%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1.00	153.514.840,00	1.00	153.272.850,00	100%	99.84%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAA	Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	15.83	1.083.000.000,00	15.83	1.079.765.080,00	100%	99.7%
801	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	1.083.000.000,00	100.00	1.079.765.080,00	100%	99.7%
801	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4	1.083.000.000,00	4.00	1.079.765.080,00	100%	99.7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,70
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,70
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDID	Persentase Pembinaan terhadap Partai Politik	%	100.00	30.536.767.355,00	100.00	30.532.114.081,00	100%	99.98%
801	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Tersusunnya Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pem	%	100	30.536.767.355,00	100.00	30.532.114.081,00	100%	99.98%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
801	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	4	1.084.042.855,00	4.00	1.083.389.195,00	100%	99.94%
			0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemant	Orang	240.00	29.452.724.500,00	240.00	29.448.724.886,00	100%	99.99%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,97
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,98
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	Persentase pembinaan terhadap Ormas	%	100.00	270.000.000,00	100.00	268.244.500,00	100%	99.35%
801	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberda	Ttersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	270.000.000,00	100.00	268.244.500,00	100%	99.35%
801	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	270.000.000,00	1.00	268.244.500,00	100%	99.35%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,35
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,35

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIA	Prosentase Pembinaan bidang sosial dan budaya	persen	100.00	55.000.000,00	100.00	54.531.000,00	100%	99.15%
801	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahana	Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Bulan	12.00	55.000.000,00	12.00	54.531.000,00	100%	99.15%
801	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, B	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	455.00	55.000.000,00	455.00	54.531.000,00	100%	99.15%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,15
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,15
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
801	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KU	Persentase potensi konflik yang ditangani	%	100	7.233.620.000,00	100.00	7.191.017.406,00	100%	99.41%
801	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nas	Tersusunnya Kebujakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik Sosial	%	100	7.233.620.000,00	100.00	7.191.017.406,00	100%	99.41%
801	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kabijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pe	Orang	647.00	6.258.620.000,00	1000.00	6.251.503.650,00	154.56%	99.89%
			0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	975.000.000,00	6.00	939.513.756,00	100%	96.36%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											127,28	98,13
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,41
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											83,33	98,52
Predikat kinerja seluruh program(%)											Tinggi	Sangat Tinggi
Total								42.574.666.963,00	42.301.761.360,00			
Persentase Realisasi Anggaran								99.36%				
Predikat								Sangat Tinggi				

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021-2026

Rencana strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui imbal balik.

Rencana strategik memiliki arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk mencapai keberhasilan hendaknya didasarkan pada faktor internal maupun eksternal dan memperhitungkan kekuatan (strenghts) kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (treats) yang ada.

Secara nyata perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Dinas / Badan / Kantor.

Dalam pemerintah dan merupakan hasil integrasi antara keahlian sumber daya perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah :

1. Pelayanan Prima yang Baik di Bidang Kesbangpol;
2. Meningkatnya Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah

2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	URAIAN
1.	Terwujudnya Kinerja Pelayanan PD yang Optimal	1.1	Hasil Nilai IKM PD	87,18
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan kebangsaan	2.1	Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	13,1%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	3.1	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	19,1%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	4.1	Prosentase Ormas yang mendapatkan predikat baik	32,9%
5.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	5.1	Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	100 %

2.1.3 PROGRAM

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2024 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Budaya Politik,.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

2.2 PERJANJIAN KINERJA 202



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ronggowarsito No. 07 Telp. (0357) 881066
email : bakesbangpol@pacitankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,

Pacitan, 02 Januari 2024
Pihak Pertama,

BUPATI PACITAN


INDRATA NUR BAYUAJI

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**


MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680528 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	1. Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	87,18
2.	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	2. prosentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	13,1 %
3.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	3. Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	100 %
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	4. Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam Bidang Politik	19,1%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	5. Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik	32,9 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.795.607.944,-	APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.003.000.000,-	APBD
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 30.328.767.355,-	APBD
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 195.000.000,-	APBD
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Rp. 20.000.000,-	APBD
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 6.220.000.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 40.562.375.299,-	

Mengetahui
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN


INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**



MUNIRUL ICHWAN, S.STP
Pemina Tingkat I
NIP. 19680528 199810 1 001

2.3 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TARGET	
							INDUK	PERUBAHAN
1		2	3			4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN							2.321.694.973,	2.492.994.973
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.955.000	39.190.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Input	:	Dana	Rp.	17.955.000	39.190.000
			Output	:	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja keuangan	Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.031.751.444	2.272.443.108
	Penyediaan Gaji dan	Kab. Pacitan	Input	:	Dana	Rp.	2.031.751.444	2.272.443.108
			Output	:	Tersedianya gaji, tunjangan	Bulan	14	14

	Tunjangan ASN				dan TPP ASN 14 bulan			
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Input	:	Dana	Rp.	22.810.500,00	22.810.500,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Output	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Input	:	Dana	Rp	10.663.500	20.793.500
			Output	:	Jumlah PengadaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Paket	1	1
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input	:	Dana	Rp	33.805.820,00	53.354.970
			Output	:	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	Paket	1	1
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input	:	Dana	Rp	16.414.490,00	31.663.055,00
			Output	:	Jumlah Pengadaan peralatan RT	Paket	1	1

			Outcomes	:	Hasil Nilai SAKIP PD	Nilai	88,15	89,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Input	:	Dana	Rp	35.090.350,00	55.968.925,00
			Output	:	Jumlah Pengadaan Logistik Perangkat Daerah	Paket	1	1
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Input	:	Dana	Rp	29.221.500,00	42.004.710,00
			Output	:	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1
			Outcomes	:	Hasil Nilai SAKIP PD	Nilai	88,15	89,51
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Input	:	Dana	Rp	109.570.000,00	321.010.000,00
			Output	:	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Laporan	12	12
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						212.122.500	251.007.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Input	:	Dana	Rp	Rp3.100.000	Rp3.100.000
			Output	:	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input	:	Dana	Rp	53.704.000,00	65.884.500,00
			Output	:	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Lapaoran	12	12
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Input	:	Dana	Rp	212.110.500,00	215.110.500,00
			Output	:	Jumlah Aktivitas/Operasional Rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	Laporan	12	12
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input	:	Dana	Rp	65.896.000,00	99.431.000,00
			Output	:	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat, serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	11	12
			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input	:	Dana	Rp	153.514.840,00	153.514.840,00
			Output	:	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	1

			Outcomes	:	Hasil Nilai IKM PD	Nilai	87,18	89,51
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						580.729.000	1.083.000.000,00
7	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.083.000.000,00	1.083.000.000,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Input	:	Dana	Rp	1.083.000.000,00	1.083.000.000,00
			Output	:	Jumlah Dokumen bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika yang dicetak	Dokumen	4	4
			Outcomes	:	Prosentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	13,1	13,1
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						30.328.767.355,00	30.536.767.355,00

8.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						30.328.767.355,00	30.536.767.355,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Input	:	Dana	Rp	1.056.042.855,00	1.084.042.855,00
			Output	:	Jumlah Dokumen Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang di cetak	Dokumen	4	4
			Outcomes	:	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik	%	19,1	21
	Pelaksanaan Kebijakan		Input	:	Dana	Rp	29.272.724.500,00	29.452.724.500,00

	di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
			Output	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	240	370
			Outcomes	:	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik	%	19,1	21
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						174.836.000,	234.836.000,0
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						270.000.000	270.000.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan		Input	:	Dana	Rp	270.000.000	270.000.000

10.	Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Output	:	Jumlah Data Ormas yang dimutakhirkan dan Fasilitas bantuan ormas	Laporan	1	1
			Outcomes	:	Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik	%	32,9	35,7
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						20.000.000,00	Rp55.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya						20.000.000,00	Rp55.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		Input	:	Dana		20.000.000,00	Rp55.000.000,00
			Output	:	Jumlah Orang yang melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	455	655

	di Daerah		Outcomes	:	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	%	13,1	13,1
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						3.076.736.000,0	2.890.736.000,00
12	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						3.076.736.000,0	2.890.736.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi		Input	:	Dana	Rp	5.720.000.000,00	6.258.620.000,00
			Output	:	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Orang	647	1.400

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pe			
			Outcomes	:	Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	%	100	216
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota		Input	:	Dana	Rp	500.000.000,00	975.000.000,00
			Output	:	Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan	Bulan	6	6
			Outcomes	:	Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	%	100	216

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	Hasil Nilai IKM PD	87,18	89,51	102,7
NILAI SASARAN I					102,7
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	13,1	13,1	100
NILAI SASARAN II					100%
3.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini di	% Potensi Konflik yang	100	100	100%

	Masyarakat	dapat di cegah			
NILAI SASARAN III					100%
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	% Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	19,1	21	109,9%
NILAI SASARAN IV					109,9%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Ormas yang mendapat Predikan Baik	32,9	35,7	106,3 %
Nilai Sasaran V					108,5%
Nilai Rata-rata Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik = (1+2+3+4+5)/5 = (102,7+100+100+109,9+ 108,5) / 5 = 104,2%					

1. Sasaran Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran I untuk tahun 2024, target Hasil Nilai IKM adalah 87,18 dan terealisasi 89,51 yang diperoleh dari hasil kuesioner Sukma-e.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan dari target yang ditetapkan sebesar 87,18 tercapai sebesar 89,51 dengan tingkat capaian sebesar 102,6% atau dengan kategori capaian yang baik. Hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dengan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik.

2. Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran II untuk tahun 2024 dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Wasbang}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{capaian tahun lalu (74.900) + target th n (4.300) = 79.200}}{\text{kenaikan jumlah penduduk/tahun(598.232*0,54% + (3.230)=601.462}} = 13,1\%$$

Dari perhitungan diatas, untuk Indikator % Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan capaian kinerja tahun 2024 dari target 13,1 terealisasi 13,1 atau 100%.

Untuk Sasaran ini didukung oleh 2 indikator program yaitu Indikator Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan target 15,83 % dan bisa terlaksana 100 % dan Indikator Prosentase Pembinaan Bidang Sosial Budaya dengan target dan realisasi 100%. Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah dana sebesar Rp. 1.083.000.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 1.079.765.080,- dengan prosentase 99,70% .
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah anggaran sebesar Rp. 124.125.550,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 122.137.770,- atau capaian sebesar 98,40%.

3. Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Dini di Masyarakat

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran III untuk tahun 2024 yaitu Prosentase Potensi Konflik yang dapat di cegah dengan target 100% dan realisasi kegiatan 100% telah dilaksanakan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik yang ada}} \times 100$$

$$= \frac{1}{1} = 100 \%$$

Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Indikator Prosentase Potensi Konflik yang ditangani dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.531.000,- atau capaian sebesar 99,14%.

4. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran IV untuk tahun 2024 yaitu Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik dengan target 19,1 % atau dan realisasi kegiatan 100% telah dilaksanakan dengan rumus perhitungan ;

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Sosialisasi}}{\text{Target Peserta 5 tahun}} \times 100$$

$$= \frac{\text{capaian tahun lalu (1.020) + target th n (240) = 1.260}}{6.600} \times 100\% = 19,1$$

Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah dana sebesar Rp. 30.536.767.355 ,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 30.532.114.081,- prosentase 99,98%

5. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran V untuk tahun 2023 yaitu Prosentase Ormas yang mendapat Predikan Baik dengan target 32,9 % dan tercapai 35,7 % terealisasi 106 % dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Ormas yang berbadan hukum}}{\text{Jumlah Ormas seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{113}{316} \times 100 = 35,7\%$$

Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Indikator Prosentase pembinaan terhadap Ormas dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Pemberdayaan dan pengawasan Ormas, dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah dana sebesar Rp. 270.000.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 268.244.500,- atau capaian sebesar 99,34%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

**Tabel 3.3 Target Capaian tahun lalu dan tahun yang akan datang
(sesuai periode Renstra)**

NO	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian 2021-2026 (%)			Realisasi Capaian	(%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD
			Th 2021	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan tentang Kebangsaan	100	13,1	13,8	14,4	100	12,5	13,1	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Prosentase potensi konflik yang dapat dicegah	100	100	100	100	100	100	216	-	-	-	-

3	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	12,7	19,1	23,6	29,1	14,6	15,4	21	-	-	-	-
4.	Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik	42	32,9	35	36,9	32,6	30,7	35,7	-	-	-	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Pencapaian kinerja sasaran dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/ RENSTRA dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal (PD)	Hasil Nilai IKM PD	90,10	89,51	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan	Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan	14,4	13,1	
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Prosentase Potensi Konflik yang dapat di cegah	100	100	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik.	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	29,1	21	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Prosentase Ormas yang mendapat Predikan Baik	36,9	35,7	

Pencapaian kinerja program dibandingkan dengan target akhir RPJMD / Renstra ada 5 indikator capaian program yang belum tercapai dari target akhir RPJMD/RENSTRA seperti dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5 Capaian Program Terhadap Target Akhir RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Strategis Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal (PD)	Hasil Nilai SAKIP PD	76,91	75,61	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan	Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan	17,29	15,83	

Kebangsaan	wawasan kebangsaan			
	Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya	100	100	
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Prosentase Potensi Konflik yang ditangani	100	100	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik.	Prosentase Pembinaan Terhadap Partai Politik	100	100	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Prosentase pembinaan terhadap Ormas	100	100	

4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tidak dapat dibandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Sasaran Strategis 1** Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran I untuk tahun 2024, target Hasil Nilai IKM adalah 87,18 dan terealisasi 89,51 yang diperoleh dari hasil kuesioner Sukma-e. Untuk Sasaran ini didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan dengan indikator Program yaitu Hasil Nilai SAKIP PD dengan target 76,31 dan tercapai 75,61 dengan kategori sangat baik atau BB adanya penurunan target dikarenakan ada beberapa komponen yang belum terpenuhi.

Pada tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.574.666.963,- dengan rincian:

- a. Belanja Operasi : Rp. 42.473.214.073,-
- b. Belanja Modal: Rp. 101.452.890,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 42.301.761.360,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,3% dan sisa anggaran

Rp. 272.905.603,- di rekening belanja gaji dan tunjangan ASN, dan rekening Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Untuk sasaran ini di dukung 1 Indikator Program yaitu Hasil Nilai SAKIP PD dengan target 76,31 dan tercapai 75,61 dengan kategori sangat baik atau BB adanya penurunan target dikarenakan ada beberapa komponen yang belum terpenuhi. Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah anggaran Rp. 39.190.000,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 37.510.400,00,- atau terealisasi sebesar 95,7%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.272.443.108,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.232.775.768,- atau capaian sebesar 98,2%.
- c) Administrasi Kepegawaian Daerah Jumlah anggaran sebesar Rp. 22.810.500,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 22.635.000,- atau capaian sebesar 99,2%.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah anggaran sebesar Rp. 524.795.160,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 354.231.547,- atau capaian sebesar 67,49%.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah anggaran sebesar Rp. 284.095.000,0,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 279.555.028,- atau capaian sebesar 98,40%.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah anggaran sebesar Rp. 252.945.840,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 249.381.550,- atau capaian sebesar 98,59%.

b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwawasan kebangsaan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran II untuk tahun 2024 dengan Dari perhitungan diatas, untuk Indikator % Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan capaian kinerja tahun 2024 dari $ta \times 100\%$ ealisasi 13,1 atau 100%.

Untuk Sasaran ini didukung oleh 2 indikator program yaitu Indikator Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan target 15,83 % dan bisa terlaksana 100 % dan Indikator Prosentase Pembinaan Bidang Sosial Budaya dengan target dan realisasi 100%. Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah dana sebesar Rp. 1.083.000.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 1.079.765.080,- dengan prosentase 99,70% .
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah anggaran sebesar Rp. 124.125.550,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 122.137.770,- atau capaian sebesar 98,40%.

c. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kewaspadaan Dini di Masyarakat

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran III untuk tahun 2024 yaitu Prosentase Potensi Konflik yang dapat di cegah dengan target 100% dan realisasi kegiatan 100% telah dilaksanakan. Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Indikator Prosentase Potensi Konflik yang ditangani dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.531.000,- atau capaian sebesar 99,14%.

d. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran IV untuk tahun 2024 yaitu Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik dengan target 19,1 % atau dan realisasi kegiatan 100% telah dilaksanakan. Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah dana sebesar Rp. 30.536.767.355 , - dengan dana yang terserap sebesar Rp. 30.532.114.081,- prosentase 99,98%

e. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran V untuk tahun 2023 yaitu Prosentase Ormas yang mendapat Predikan Baik dengan target 32,9 % dan tercapai 35 % terealisasi 106 %. Untuk Sasaran ini didukung oleh 1 indikator program yaitu Indikator

Prosentase pembinaan terhadap Ormas dengan target 100 % dan bisa terlaksana 100 % . Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Pemberdayaan dan pengawasan Ormas, dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah dana sebesar Rp. 270.000.000,- dengan dana yang terserap sebesar Rp. 268.244.500,- atau capaian sebesar 99,34%

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 2 yaitu anggaran dan sumber daya manusia.

- a. Efisiensi Sumber Daya Anggaran Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2024, untuk mencapai sasaran strategis, Bakesbangpol Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.574.666.963,- dengan rincian:

- Belanja Operasi : Rp. 42.473.214.073,-
- Belanja Modal: Rp. 101.452.890,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 42.301.761.360,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,3% .

Maka untuk memperoleh efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAKi \times Cki) - RAKi}{\sum PAKi} \times 100\%$$

(Surat Sekda Pacitan tgl. 5 Desember 2024 No. 000.8.6.3/4311/408.22/2024)

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Pagu anggaran

RAKi = Realisasi anggaran

Cki = Capaian kinerja

Tabel 3.6 Capaian Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal (PD)	Hasil Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.396.279.608	3.176.089.293	76,31	75,3
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan	Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.083.000.000,	1.079.765.080	15,83	14,8
	Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	55.000.000	54.531.000	100	99
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Prosentase Potensi Konflik yang ditangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	7.233.620.000	7.191.017.406	100	99
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik.	Prosentase Pembinaan Terhadap Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.536.767.355	30.532.114.081	100	99
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Prosentase pembinaan terhadap Ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.000.000	268.244.500	100	99

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8 Daftar nominatif pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Sekretariat	Bidang Politik Dalam Negeri	Bidang Integrasi Bangsa	Bidang Kewaspadaan
1	S2	2	1	1	1
2	S1/D4	6	4	4	3
3	D3	1	-	0	-
4	SMA/Sederajat	2	-	0	4
5	SMP/Sederajat	-	-	0	0
	Jumlah	11	5	5	8

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SD/MI 0 orang (0%), SLTP/MTS 0 orang (0%), SLTA/MA 6 orang (20,6%), DII 0 orang (0%), DIII 1 orang (3,4%), Strata 1 (S1) 17 orang (58,6%) dan Strata 2 (S2) 5 orang (17,2%).

7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah seluruh program dan kegiatan yang berdasarkan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan utuh yang mendasari gerak pijak pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja didukung program :

- a. Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan kesatuan Bangsa dan Politik didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Tentang Wawasan Kebangsaan Didukung Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Dengan Kegiatan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
 2. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
- c. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik Di Dukung Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pemngembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Kegiatan :
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- d. Indikator Kinerja Sasaran Ormas yang mendapat predikat baik dengan kegiatan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Potensi Konflik yang ditangani dengan kegiatan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) adalah terciptanya transparansi dan

akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dalam hal ini Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (financial accountability) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja. Pada tahun 2024 Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar Rp. 42.574.666.963,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.301.761.360,00 atau terealisasi sebesar 99,3%. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan pada Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj.IP Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Anggaran 2024, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 6 (enam) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan sekretariat. Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan belanja dari anggaran baik yang digunakan untuk belanja operasi maupun belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal (PD)	Hasil Nilai IKM PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.396.279.608	3.176.089.293	220.190.315	99,5
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan	Prosentase Kelompok masyarakat yang mendapatka	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter	1.083.000.000	1.079.765.080	3.234.920,00	99,7

Kebangsaan	n pembinaan wawasan	Kebangsaan				
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	55.000.000	54.531.000,0	469.000	99,1
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Prosentase Potensi Konflik yang dapat di cegah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	7.233.620.000	7.191.017.406	42.602.594	99,4
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik.	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.536.767.355	30.532.114.081	4.653.274	99,9
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Prosentase Ormas yang mendapat Predikan Baik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.000.000	268.244.500,	1.755.500	99,3

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan pada Tahun 2024 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan melihat indikator outcome-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2024 dapat dikatakan baik untuk 6 (Enam) program, 12 (Duabelas) kegiatan, dan 20 Sub kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 104,2% dari target 100,00%. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2024 yaitu realisasi keuangan sebesar 99,3%

5.1 SARAN TINDAK LANJUT

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan Kinerja Badan Kesbangpol dalam mencapai sasaran disemua bidang, maka perlu dilakukan beberapa hal :

1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian di Kabupaten Pacitan secara umum sehingga diperlukan kordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pacitan.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas maupun LSM, parpol dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesbangpol dalam menunjang pelaksanaan kerja.
5. Adanya kesamaan persepsi tentang penetapan satuan indikator kinerja setiap kegiatan.

6. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal.

Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kesbangpol Kabupateen Pacitan Tahun 2021-2026.



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN**

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780528 199810 1 001

RENSTRA 2021-2026
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pacitan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi pada periode SKPD	Kinerja akhir Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Pelayanan Prima yang baik dibidang kesbangpol				IKM minimal Baik															
	Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal (PD)			Hasil Nilai IKM PD	83	86,35		87,18		88,15		89,13		90,10		90,10			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil Nilai SAKIP PD	75,41	75,71	2.697.162.965	76,01	2.280.320.443	76,31	2.336.902.126	76,61	2.394.898.351	76,91	2.454.344.482	76,91	2.454.344.482		

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	23 Dokumen	32.555.750	23 Dokumen	24.059.700	23 Dokumen	27,192,100	23 Dokumen	27,463,950	23 Dokumen	28,150,500	23 Dokumen	28,150,500		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, PRG, RKA, RK A Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKJIP, Evaluasi Renja tribulan 1, Evaluasi Renja tribulan 2, Evaluasi Renja tribulan 3, Evaluasi Renja tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja, Renaksi Pencapaian Kinerja P, LKPJ, LPPD, PMPRB, Laporan SAKIP, SPIP, Review Probis, Inovasi Pelayanan Publik, SPM	12 bulan	12 bulan	24.820.000	12 bulan	17.504.600	12 bulan	18,328,500	12 bulan	18,511,750	12 bulan	18,974,500	12 bulan	18,974,500		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	7.735.750	12 Bulan	6.555.100	12 Bulan	8,863,600	12 Bulan	8,952,200	12 Bulan	9,176,000	12 Bulan	9,176,000		

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan erangkat Daerah	9 Dokumen	59 Dokumen	1.865.746.765	59 Dokumen	1.576.929.998	59 Dokumen	1.653.450.904	59 Dokumen	1.669.984.973	59 Dokumen	1.711.816.482	59 Dokumen	1.711,816,482		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tnjangsan(14	14 bulan	14 bulan	1.855.630.265	14 bulan	1.567.560.598	14 bulan	1.641.342.572	14 bulan	1.657.755.573	14 bulan	1,699,219.482	14 bulan	1,699.219.482		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	CALK (1),	12 bulan	12 bulan	5.058.250	12 bulan	4,684,700	12 bulan	6,054,166	12 bulan	6,114,700	12 bulan	6,298,300	12 bulan	6,298,300		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	SPJ Fungsional (12) LRA (12), LO (12), Rekonsiliasi Akuntansu(4), Rekon fungsioanl(4)	12 bulan	12 bulan	5.058.250	12 bulan	4,684,700	12 bulan	6,054,166	12 bulan	6,114,700	12 bulan	6,298,300	12 bulan	6,298,300		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapat layanan	100	100	19.350.000	100	16.287.495	100	17.837.000	100	17,340,200	100	17,813.000	100	17,813.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai	1 paket	1 paket	19.350.000	1 paket	16.287.489	1 paket	17.837.000	1 paket	17,340,200	1 paket	17.813.000	1 paket	17,813.000		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	354.195.650	100	293.101.706	100	232.920.650	100	304.689.450	100	311.761.650	100	311.761.650		

			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik/penerangan kantor	1 paket	1 paket	9.038.300	1 paket	5.511.006	1 paket	8.731.500	1 paket	8.818.800	1 paket	9.039.250	1 paket	9.039.250		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	37.268.100	1 paket	26.614.000	1 paket	32.426.880	1 paket	32.751.200	1 paket	33.569.900	1 paket	33.569.900		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	36.546.750	1 paket	30.969.200	1 paket	32.426.880	1 paket	32.751.150	1 paket	33.127.600	1 paket	33.127.600		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Logistik Perangkat Daerah	1 paket	1 paket	21.028.000	1 paket	17.819.500	1 paket	18.120.006	1 paket	17.659.600	1 paket	18.758.750	1 paket	18.758.750		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	23.580.500	1 paket	20.056.000	1 paket	20.319.584	1 paket	19.522.700	1 paket	20.789.750	1 paket	20.789.750		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 bulan	12 bulan	226.734.000	12 bulan	192.132.000	12 Laporan	211.895.800	12 laporan	193.186.000	12 bulan	205.515.650	12 bulan	205.515.650		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	65.000.000	100%	50.282.500	100%	0	100%	60.000.000	100%	61.500.000	100%	61.500.000		

			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket	65.000.000	1 paket	50,282,500	1 paket	0	1 paket	60.000.000	1 paket	67,500,000	1 paket	61.500.000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100%	100%	267.629.300	100%	227.617.150	100%	237,464,472	100%	239,836,900	100%	245,832,750	100%	245,832,750		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2.000.000	12 bulan	1.699.450	12 bulan	1,779,400	12 bulan	1,797,200	12 bulan	1,842,150	12 bulan	1,842,150		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	12 bulan	43.286.000	12 bulan	36.814.800	12 bulan	38,406,472	12 bulan	38,788,400	12 bulan	39,758,100	12 bulan	39,758,100		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	222.343.300	12 bulan	189.102.900	12 bulan	197,278,600	12 bulan	199,251,300	12 bulan	204,232,500	12 bulan	204,232,500		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	80%	92.685.500	80%	92.041.900	80%	77,037,000	80%	75,582,878	80%	77,470,500	80%	77,470,500		

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat, serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	1 tahun	71.205.000	1 tahun	69.059.000	1 tahun	57.978,100	1 tahun	56,333,378	1 tahun	57,740,000	1 tahun	57,740,000		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor, bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor	1 paket	1 paket	21.480.500	1 paket	22.982.900	1 paket	19,058,900	1 paket	19,249,500	1 paket	19,730,500	1 paket	19,730,500		
Meningkatkan Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah				Jumlah Konflik Sosial	0	0		0		0		0		0		0	-		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan			Prosentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	100%	100%		12,5		13,1		13,8		14,4		14,4	-		

			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatka n pembinaan wawasan kebangsaan	100%	14.3 7 %	394.64 1.896	15.1 0 %	400.56 1.525	15.83 %	406.56 9.948	16.56 %	412.66 8.497	17.2 9 %	418.85 8.524	17.29 %	418.858 .524		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 tahun	100	394.64 1.896	100	400.56 1.525	100	406.56 9.948	100	412.66 8.497	100	418.85 8.524	100	418.858 .524		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika yang dicetak	0	4 doku men	394.64 1.896	4 doku men	400.56 1.525	4 dokum en	406.56 9.948	4 dokum en	412.66 8.497	4 doku men	418.85 8.524	4 dokum en	418.858 .524		
Menin gkatny a Keruk unan dan Stabilit as Politik Daera h				Prosentase partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu	100	100		100		100		100		100		100	-		

	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Politik			Prosentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dalam bidang politik	10.90 %	12.70 %		15.40 %		19.10 %		23.60 %		29.10 %		29.10 %	-		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik	100	100	495.083.251	100	560.165.988	100	575.410.703	100	611.417.488	100	631.591.008	100	631.591.008		

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 tahun	100	495.083.251	100	560.165.988	100	575.410.703	100	611.417.488	100	631.591.008	100	631.591.008		
--	--	--	---	---	---------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	--

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang di cetak	12 bulan	4 dokumen	196.535.300	4 dokumen	222.339.000	4 dokumen	245.261.200	4 dokumen	242.660.000	4 dokumen	250.648.800	4 dokumen	250.648.800		
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di	720 orang, 1 tahun	120	197.236.151	180	223.158.800	240	226.865.767	300	243.555.900	360	251.573.000	360	251.573.000		

				Daerah															
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	96 orang, 63 orang	2 Dokumen	101.31 1.900	2 Dokumen	114.66 8.188	2 Dokumen	139.29 0.521	2 Dokumen	125.20 1.588	2 Dokumen	137.35 8.008	2 Dokumen	137.35 8.008		
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			Prosentase Ormas yang mendapat predikat baik	25.80 %	28.40 %	529.65 8.465	30.70 %	537.60 3.342	32.90 %	545.66 7.392	35%	553.85 2.403	36.90 %	562.16 0.189	36.90 %	562.160 .189		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase pembinaan terhadap Ormas	100	100	529.65 8.465	100	537.60 3.342	100	545.66 7.392	100	553.85 2.403	100	562.16 0.189	100	562.160 .189		

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 tahun	100	529.658.465	100	537.603.342	100	545.667.392	100	553.852.403	100	562.160.189	100	562.160.189		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Data Ormas yang dimutakhirkan 2. Fasilitas bantuan ormas	286 Ormas	296 Ormas	529.658.465	1 Dokumen	537.603.342	1 Dokumen	545.667.392	1 Dokumen	553.852.403	1 Dokumen	562.160.189	1 Dokumen	562.160.189		
Meningkatkan Kerukunan dan Stabilitas Politik Daerah				Jumlah Konflik Sosial	0	0		0		0		0		0		0	-		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan			Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan bidang sosial dan budaya	100%	100 %	320.56 4.151	100 %	325.37 2.614	100%	330.25 3.203	100%	335.20 7.001	100 %	340.23 5.106	100%	340.23 5.106		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 tahun	1 tahun	320.56 4.151	1 tahun	325.37 2.614	1 tahun	330.25 3.203	1 tahun	335.20 7.001	1 tahun	340.23 5.106	1 tahun	340.23 5.106		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang melaksanaka n Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	316	425	320.56 4.151	440	325.37 2.614	455	330.25 3.203	470	335.20 7.001	485	340.23 5.106	485	340.23 5.106		
	Meningk atnya Kewaspa daan Dini Masyara kat	Pro senta se Pote nsi Konf lik yang dapa t dice gah			100	100		100		100		100		100		100			

			PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPADA AN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA N KONFLIK SOSIAL	Prosentase potensi konflik yang ditangani.	100	100	1.596. 415.34 5	100	1.806. 277.17 9	100	1.855. 434.37 3	100	1.971. 539.65 0	100	2.036. 589.95 7	100	2.036.5 89.957		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	100	1.596. 415.34 5	100	1.806. 277.17 9	100	1.855. 434.37 3	100	1.971. 539.65 0	100	2.036. 589.95 7	100	2.036.5 89.957		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakn di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	340	865.72 3.500	469	979.55 0.200	647	1.006. 205.00 0	894	1.069. 082.00 0	1.23 4	1.104. 273.20 0	1.234	1.104.2 73.200		

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	4 laporan	82.557.000	4 laporan	93.408.000	4 laporan	95.952.000	4 laporan	101.947.000	4 laporan	105.302.750	4 laporan	105.302.750		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan	12	6 kali	648.134.845	6 kali	733.318.979	6 kali	753.277.373	6 kali	800.510.650	6 kali	827.014.007	6 kali	827.014.007		



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ronggowarsito No. 7 Pacitan 63515
Telp/Fax. (0357) 881066 e-mail: kesbangpol@pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.4 / 501 / 408.58 / 2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6311;Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
5. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
6. Indikator Kinerja Utama; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
7. Pacitan Tahun 2005-2025; Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Kabupaten Pacitan; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
9. Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

PACITAN.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dalam ;
- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 3 Juli 2023



**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
PACITAN**

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780528 199810 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan
Nomor : 188.4/ 501 /408.58/2023
Tanggal : Juli 2023

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN.**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN**

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

FUNGSI : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ;
3. PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
4. PEMBINAAN DAN EVALUASI DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , DAN
6. PELAKSANAAN DAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

No	Sasaran Strategis		IKU Perangkat Daerah	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra PD				
1.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	1. Meningkatnya	1. Prosentase Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan	Bidang Ideologi, Wasbang,	Jumlah Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

LKJIP BAKESBANGPOL TAHUN 2024

		Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan.	Masyarakat yang mendapat Pembinaan Tentang Wawasan kebangsaan	Politik Kab. Pacitan	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kab Pacitan}}{\text{Jumlah Penduduk Kab Pacitan}} \times 100\%$
		2. Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat	2. Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terfasilitasi}}{\text{Potensi Konflik yang ada}} \times 100\%$
		3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik.	3. Prosentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Peserta Sosialisasi}}{\text{Target peserta sosialisasi 5 tahun}} \times 100\%$
		4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.	4. Prosentase Ormas yang Mendapat Predikat Baik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Berbadan Hukum}}{\text{Jumlah Ormas Seluruhnya}} \times 100\%$

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 3 Juli 2023



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN**

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19780528 199810 1 001